

### **BUPATI LAMONGAN**

## KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/310/Kep/413.013/2015

### TENTANG

# PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA GUCI KECAMATAN KARANGGENENG

## BUPATI LAMONGAN,

Membaca

Surat Camat Karanggeneng, tanggal 26 Mei 2015 Nomor: 140/550/413.307/2015 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Guci.

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. MASKUR HASIM, Penjabat Kepala Desa Guci Kecamatan Karanggeneng terhitung tanggal 4 Agustus 2015 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberhentikan dan Penjabat mengangkat Kepala Desa Guci Kecamatan Karanggeneng dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan, KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MASKUR HASIM, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Guci Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

Mengangkat Sdr. SUDIRMAN Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karanggeneng, sebagai Penjabat Kepala Desa Guci Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

**KETIGA** 

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 21 Januari 2015 Nomor: 188/48/Kep/413.013/2015 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIAT DATE

Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 6 Agustus 2015

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2.Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3.Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;

4.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Camat Karanggeneng;

6.Sdr. Penjabat Kepala Desa Guci Kecamatan Karanggeneng;

7.Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Guci Kecamatan Karanggeneng.

> suai dengan aslinya Lagian Hukum,

YOSÉP DWI PRIHATONO